

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pariwisata tidak dapat diragukan lagi telah menjadi suatu fenomena sosial dan ekonomi di era globalisasi saat ini, terkait hal ini berbagai pakar ekonomi telah mempredisikan jika sektor pariwisata akan menjadi kegiatan ekonomi yang penting di abad 21 dan mampu menjadi katalisator pembangunan yang memberikan dampak perekonomian di suatu negara yang dikunjungi oleh wisatawan. Organisasi pariwisata dunia (*World Tourism Organization*) dalam hal ini menjelaskan bahwa selama beberapa dekade, pariwisata global terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan mengubah pariwisata menjadi pendorong utama kemajuan sosial ekonomi di suatu negara (UNWTO, n.d.) Implikasi dari berkembangnya pariwisata dunia yang begitu pesat kemudian membuat aktivitas berwisata tidak lagi terbatas pada suatu negara saja namun kini aktivitas berwisata telah menjadi kegiatan global yang tidak lagi di batasi oleh batasan wilayah suatu negara sehingga siapapun memiliki hak yang sama untuk menjalankan kegiatan berwisata (Gelgel, 2006)

Di kawasan Eropa, pariwisata telah menjadi suatu primadona dan menjadi industri sektor utama ekonomi eropa yang dapat menghasilkan lebih dari 10% dari PDB Uni Eropa hal ini di sebabkan karena sebagian besar orang-orang eropa sangat gemar menghabiskan sebagian uang mereka untuk berpergian menikmati berbagai aspek seperti untuk berlibur dan berbelanja, belajar serta bekerja. Sementara UNECO (*United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization*) memperkirakan bahwa ASIA Tenggara akan menjadi tujuan wisata kedua terbesar yang dapat mendatangkan banyak turis pada tahun 2020 (Cochrane,2008.). Dari kondisi perkembangan pariwisata global yang terus berkembang membuat fenomena trend perkembangan pariwisata antar negara seolah hendak saling berlomba-lomba untuk melebihi negara yang lain untuk menarik lebih banyak wisatawan ke negaranya masing-masing.

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, pariwisata adalah salah satu sektor yang telah terkena imbas dari aturan liberalisasi jasa oleh WTO (*World Trade Organization*) melalui “*General Agreement on Trade in Services (GATS)*” yang ditandatangani oleh berbagai negara dunia pada tahun 1994 dalam putaran Uruguay<sup>1</sup>. Sementara dalam konteks kawasan regional ASEAN, liberalisasi jasa pariwisata telah di atur dalam wadah AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*) yang di sepakati oleh negara-negara ASEAN pada tahun 1995, dimana AFAS mengikuti aturan yang telah di atur dalam GATS<sup>2</sup>. Sementara pembahasan mengenai proses liberalisasi dan kerjasama pengembangan sektor pariwisata di ASEAN pertama kali dibahas oleh negara anggota ASEAN dalam KTT I ASEAN pada tahun 1967 di Bali dengan di bentuknya Bali Concord I guna membahas beragam persoalan dan kerjasama di ASEAN seperti : kesepakatan kerjasama perekonomian, keamanan dan kerjasama pengembangan pariwisata ASEAN dengan dibentuknya *Sub-Committee on Tourism* dan mendorong kerjasama ASEAN di sektor pariwisata dalam tiga hal yaitu : pemasaran pariwisata, promosi pariwisata dan penelitian (ASEAN Secretariat, 2012) serta secara perlahan mewajibkan negara anggota ASEAN untuk menerapkan adanya penghapusan atas masuknya jasa, tenaga kerja serta perusahaan dari negara-negara ASEAN lainnya. (Antariksa, 2011)

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki komitmen terhadap seluruh aturan liberalisasi yang kemudian dalam berbagai hal ini membawa Indonesia pada arus liberalisasi jasa. Komitmen liberalisasi pariwisata Indonesia di segala forum regional termasuk ASEAN, tidak dapat lepas dari komitmen liberalisasi perdagangan yang dirundingkan di forum perundingan WTO, sehingga aturan liberalisasi jasa oleh WTO telah menjadi komitmen dasar bagi negara-negara ASEAN dalam melakukan suatu perundingan. Pemerintah Indonesia percaya bahwa dengan

---

<sup>1</sup> Terbentuknya World Trade Organization (WTO) merupakan hasil dari perundingan putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS), yang dimulai pada September 1986 di Punta Del Este, Uruguay dan berakhir di Marakesh, Maroko pada 15 April 1994. Indonesia pada tahun yang sama menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, tertanggal 2 November 1994, Lembaran Negara (Staatblad) Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara (Bilblat) Republik Indonesia, Tahun 1994 Nomor 3564

<sup>2</sup> tujuan dibentuknya AFAS adalah untuk menghapus beragam hambatan substansial dalam perdagangan di bidang jasa antar negara anggota di kawasan regional untuk meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang sudah dilakukan oleh negara-negara anggota di bawah GATS dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kawasan perdagangan bebas dalam bidang jasa termasuk di dalamnya adalah di sektor pariwisata

terlibatnya Indonesia dalam sistem liberalisasi akan dapat memberikan manfaat dan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya hal ini juga senada dengan pendapat yang di sampaikan oleh S.B Joedono selaku Menteri Perdagangan RI di era Presiden Soeharto ( 1994) :

“Di tandatanganinya *Final Act* hasil kesepakatan Putaran Uruguay oleh Indonesia sesungguhnya telah didasari oleh keyakinan bahwa pilihan tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia dan menjadi payung hukum untuk melindungi Indonesia dalam menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai mitra di kancah Internasional” (Widyatedja, 2011, pp. 16–17)

Selanjutnya persetujuan Indonesia untuk menjalankan sistem liberalisasi dalam WTO dan ASEAN di tuangkan melalui Undang-undang No 7 tahun 1994 yang kemudian Undang-undang tersebut menjadi tonggak bersejarah keterlibatan Indonesia dalam sistem liberalisasi baik di tingkat global dan regional dan hal ini kemudian memungkinkan pihak asing dapat memasuki seluruh sektor perdagangan jasa di Indonesia termasuk didalamnya adalah sektor pariwisata. Alhasil sebagai komitmen Indonesia dalam liberalisasi pariwisata, pemerintah kemudian memberikan izin beroprasinya pihak asing di sektor pariwisata Indonesia pada 3 subsektor yaitu: Travel agent/Tour Oprational, Tenaga kerja asing setingkat manager dan Hote (Widyatedja, 2011)

Dengan terbukanya peluang pasar di sektor pariwisata secara global dan regional membuat pemerintah Indonesia percaya bahwa Indonesia akan mampu menjadi tujuan utama bagi wisatawan mancanegara baik untuk berwisata dan melakukan investasi di Indonesia pada sektor pariwisata. Jika dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki sumber potensi pariwisata yang sangat luar biasa seperti berbagai, bahasa, budaya dan suku dan potensi alam yang indah yang kemudian menjadi daya tarik Indonesia terhadap dunia di berbagai bidang, salah satunya di bidang pariwisata

Pada tahun 1974, Indonesia mulai berkomitmen merencanakan pariwisatanya sebagai salah satu bidang yang sangat diandalkan potensinya di kancah Internasional dan khususnya di wilayah regional ASEAN sebagai sebuah industri yang diharapkan kedepannya mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara

Namun adanya krisis global di tahun 1997, manjadi pengamhambat pembangunan sektor pariwisata Indonesia dikarenakan saat itu pemerintah terpaksa harus

mengesampingkan sektor pariwisata nasional untuk fokus pada pemulihan ekonomi yang telah bergejolak (Damanik, 2013)

Gejolak pariwisata Indonesia nampaknya terus berlanjut, dimana pada tahun 2002 adalah momentum terberat yang sangat memukul dunia pariwisata Indonesia menjadi terpuruk akibat terjadinya peristiwa bom bali 1 yang terjadi pada tanggal 12 oktober 2002 dan berselang berapa tahun kemudian teragedi bom bali (Bom bali 2 ) kembali terjadi pada tanggal 5 oktober 2005 menyebabkan Indonesia menjadi sorotan dunia kala itu dan sebagai imbas dari kejadian itu menyebabkan banyaknya penundaan serta pembatalan perjalanan wisata ke Indonesia dan beberapa negara seperti Australia, Inggris dan Amerika mengeluarkan travel warnig kepada warga negaranya untuk tidak berpergian ke Indonesia dengan alasan faktor keselamatan dan keamanan yang ada di Indonesia .(Merdeka.com, 2018) Dalam hal ini sektor pariwisata terlihat sangat rentan terhadap krisis ekonomi, kemananan, bencana dan instabilitas politik yang terjadi di suatu negara atau kawasan.(Damanik, 2013)

Dari berbagai peristiwa dalam negeri tersebut seakan telah menghantantam sektor pariwisata Indonesia untuk sulit berkembang dan dikenal luas di kancah internasional, sementara dalam konteks regional pariwisata Indonesia akan di hadapi dengan persaingan yang sangat ketat antar negara-negara ASEAN seiring berkembangnya kerjasama ASEAN. Dalam hal ini dimana pada tahun 2003, negara-negara ASEAN telah melakukan sebuah pertemuan *Declaration of ASEAN Concord II* ( Bali Concord II) yang di adakan di Bali untuk membahas mewujudkan kawasan ASEAN menjadi kawasan yang lebih terintegrasi ekonomi yang di kenal dengan istilah Masyarakat ekonomi ASEAN yang resmi di laksanakan pada 31 Desember 2015. Dengan adanya MEA maka semua negara yang menjadi anggota ASEAN wajib menjalankan sistem perdagangan bebas baik di sektor barang dan jasa termasuk di dalamnya adalah sektor pariwisata untuk mencapai dan mewujudkan kasawan yang kompetitif, makmur dan stabil (Nur, 2017).

Dari penjelasan di atas, maka isu peariwisata dalam MEA akan di kembangkan menjadi *ASEAN Tourism Single Destination* yang bertujuan untuk mempermudah akses konektivitas antar regional ASEAN. dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi regional dengan kemudahan akses pariwisata yang dapat dijangkau oleh para turis regional ataupun turis yang berasal dari luar ASEAN. Selanjutnya, promosi pariwisata

bukan lagi Indonesia sendiri maupun Malaysia sendiri, tetapi menjadi kesatuan Visit ASEAN. Hal ini merupakan bentuk integrasi ekonomi yang terkait dengan sektor sosial budaya dalam pengembangan pariwisata ASEAN sehingga hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi setiap negara ASEAN untuk memajukan pariwisatanya. (Arifin, 2008), Oleh kerana itu MEA harusnya dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan sektor pariwisatanya namun sebaliknya, adanya MEA juga tentu akan bisa menjadikan ini sebagai ancaman baru bagi sektor pariwisata Indonesia jika pemerintah Indonesia lamban dalam menerapkan kebijakan yang tepat untuk membenahi pariwisatanya. sementara dapat kita liat bagaimana perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke negara-negara ASEAN sebagai berikut :

**Table 1.**  
**Kunjungan Wisatawan mancanegara ke ASEAN, 2005-2012**

Country of Destination	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Share (%) 2012
Malaysia	16,431	18,472	20,236	22,052	23,646	24,577	24,714	25,033	28.1
Indonesia	5,002	4,871	5,506	6,429	6,324	7,003	7,650	8,044	9.0
Singapore	8,942	9,752	10,288	10,116	9,681	11,639	11,639	14,491	16.2
Thailand	11,517	13,822	14,464	14,597	14,150	15,936	19,098	22,354	25.1
Philippines	2,623	2,688	3,092	3,139	3,017	3,520	3,917	4,273	4.8
ASEAN 5	44,516	49,605	53,586	56,335	56,818	62,676	68,551	74,195	83.2

Source : di olah dari <https://www.aseanstats.org/>

Dari data di atas terlihat bahwa sektor pariwisata Indonesia masih berada jauh dari negara ASEAN yang hanya berada di posisi ke 4 sebagai pilihan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia disisi lain data tersebut menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia masih tertinggal dari negara ASEAN lainnya seperti ; Malaysia, Thailand, Singapore, sementara posisi Indonesia tidak tarpaut jauh dari Philipines. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka MEA akan menjadi acaman bagi Indonesia karena MEA mendorong Kompetisi perdagangan yang lebih terbuka dan sangat kompetitif . semenatara, Alviani selaku Sekretaris Komite Ekonomi Nasional ( KEN) menyampaikkann jika pemerintah tidak mempersiapkan kebijakan yang baik maka MEA juga akan memberikan peluang

bagi para pekerja profesional dari negara-negara ASEAN lainnya untuk memenuhi peluang kerja di sektor pariwisata Indonesia (Suara.com, 2016)

Maka adanya MEA secara tidak langsung pariwisata Indonesia di dorong untuk lebih kompetitif di era keterbukaan pasar ASEAN dan oleh karena itu pemerintah Indonesia setidaknya perlu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan pariwisata Indonesia atas adanya MEA dan disisi lain adanya kiprah pihak swasta yang menjadi ujung tombak pada lingkup perdagangan jasa pariwisata juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena pengaturan yang flexible akan menjadi harapan bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatannya sehingga terwujudnya suatu sinkronisasi dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata nasional yang berasas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan (UU Pariwisata, 2009)

Beragam peristiwa yang menimpa sektor pariwisata Indonesia memaksa pemerintah Indonesia harus berfikir untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan internasional agar wisatawan mancanegara dapat kembali berwisata ke Indonesia dan kedepannya mampu bersaing di era liberalisasi perdagangan MEA, upaya pengembangan pariwisata secara bertahap mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memajukan sektor pariwisatanya sembari melakukan *revitalization dan re-positioning* kegiatan pariwisata Indonesia. (Harto & Idriasih, 2016)

Sebagai respon dari permasalahan yang di hadapi pariwisata Indonesia dan mempertegs komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan liberalisasi di sektor jasa pariwisata pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai payung hukum sekaligus sebagai wujud akan kesiapan Indonesia dalam mengadapai dan menjalankan liberalisasi pariwisata di era MEA. Dalam undang-undang tersebut pemerintah menegaskan bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Kemudian kepariwisataan didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU Pariwisata, 2009)

penejelasan mengenai makna pariwisata yang di jelaskan dalam undang-undang tersebut secara jelas mempertegas pola pembangunan pariwisata Indonesia yang perlu di bangun secara terintegrasi antar berbagai stakeholder, pengusaha bahkan masyarakat. Dan kemudian adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata diharapkan juga mampu memfasilitasi aktifitas kelancaran kegiatan bisnis dalam pariwisata.

Jika merujuk pada defenisi pariwisata dalam undang-undang tersebut secara eksplisit jelas belum di temui unsur liberalisasi dalam sektor pariwisata Indonesia. Namun jika mengacu pada pasal 10 dan pasal 56 pada undang-undang tersebut maka sangat jelas bahwa undang-undang pariwisata Indonesia telah mengakomodasi adanya peluang privatisasi asing untuk menjalankan dan mengembangkan pariwisata Indonesia melalui proses penanaman investasi asing di Indonesia hal ini kemudian juga di pertegas dengan di keluarkannya PERPRES Nomor 44 tahun 2016 yang memberikan akses seluas-luasnya bagi pihak asing untuk dapat memperoleh prihal investasi di sektor pariwisata hingga hampir 100 persen saham di sektor pariwisata dapat di kuasai oleh pihak asing.

Menanggapi adanya Integras ASEAN menjadi MEA, pemerintah Indonesia meyakini bahwa sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Republika, 2016) dan untuk mendapatkan peluang dari adanya MEA Kementerian Pariwisata dalam hal ini menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berusaha untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia dengan berbagai cara termasuk memanfaatkan adanya peluang MEA, namun upaya tersebut tak akan mampu untuk dilakukan secara sendirian melainkan perlu adanya suatu kerjasama dan koordinasi dengan banyak pihak baik dalam forum internasional, kerjasama regional ASEAN dan global, serta memberikan akses kemudahan bagi wisatawan asing untuk berwisata ataupun berinvestasi di Indonesia karena dengan upaya tersebut akan dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan informasi, arahan maupun investasi terkait pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata Indonesia dan daya saingnya di tingkat global (Direktorat Kerjasama ASEAN, 2013)

Integrasi ASEAN pada umumnya memungkinkan akan memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisatanya jika

kebijakan liberalisasi sektor pariwisata yang di lakukan benar-benar di persiapkan dengan aturan, arahan, koordinasi antar sektor yang kuat serta dipersiapkannya strategi pemasaran pariwisata yang mampu memikat daya tarik wisatawan sebab fenomena liberalisasi pariwisata sesungguhnya tidak hanya menawarkan sebuah peluang emas namun juga akan menjadi kendala karena tingginya persaingan antar negara untuk meningkatkan sektor pariwisatanya dan buruknya liberalisasi juga bisa menjadi ancaman bagi banyak sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti masalah lingkungan, imigrasi, tenaga kerja, aksi terorisme, hingga adanya berbagai bentuk kriminalitas yang dapat di timbulkan oleh para wisatawan asing yang datang ke Indonesia jika pemerintah Indonesia tidak mampu menerapkan kebijakan yang tepat dalam era liberalisasi pariwisata.

Dari uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian lebih jauh terkait dinamika liberalisasi pariwisata Indonesia dalam skema masyarakat ekonomi ASEAN, namun secara spesifik penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini untuk menganalisis serta menjelaskan mengenai bagaimana peran pemerintah Indonesia memanfaatkan MEA dan liberalisasi pariwisata sebagai sarana untuk meningkatkan pariwisatanya, penelitian ini menjadi penting untuk di teliti agar dapat memahami apakah dengan adanya upaya liberalisasi pariwisata yang di lakukan pemerintah dengan memberikan peluang investasi yang luas kepada pihak asing dan memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas jasa MEA sudah benar-benar tepat untuk pembangunan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan di Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang diajukan penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah memanfaatkan peluang keterbukaan pasar pariwisata di ASEAN untuk meningkatkan daya saing pariwisatanya dalam era MEA?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah kebijakan liberalisasi pariwisata yang di jalankan pemerintah Indonesia mampu mengikat daya saing pariwisata Indonesia di kawasan ASEAN dengan adanya peluang ASEAN Tourism Integration di era masyarakat ekonomi ASEAN, serta hambatan apa saja yang menjadi kendala pemerintah dalam menjalankan liberalisasi pada sektor pariwisatanya.
- b. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis.
- c. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan serta menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu:

- a. Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pertimbangan kepada Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Pariwisata untuk memperkuat sektor pariwisatanya di kawasan ASEAN dari adanya pengaruh kebijakan Liberalisasi ASEAN dibidang jasa khususnya pada sektor pariwisata
- b. Bagi pihak akademisi, diharapkan thesis ini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian atas pengaruh kebijakan suatu rezim dalam hubungan internasional yang mana penelitian ini memfokuskan pada isu Implikasi dari liberalisasi jasa pariwisata ASEAN terhadap perkembangan sektor pariwisata Indonesia di era masyarakat ekonomi ASEAN

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan sebuah topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, maupun sumber-sumber tertulis baik secara cetak maupun elektronik lain.

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk melakukan tinjauan pustaka, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian yang di lakukan oleh penulis, dalam hal ini Penulis mencoba melakukan sebuah tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk di jadikan suatu rujukan dan tambahan referensi dalam mengkaji permasalahan yang serupa dengan sudut pandang yang berbeda “Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. “Hal itu dimaksudkan agar mengetahui posisi dan letak” perbedaan antara penelitian sebelumnya” dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai rujukan tinjauan pustaka ada beberapa jurnal dan hasil penelitian yang penulis gunakan sebagai rujukan tinjauan pustaka :

- 1) Penelitian pertama di tuliskan oleh Sianda dan Andadari yang berjudul *“Meninbang daya saing pariwisata Indonesia ( dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand )”* yang di tuliskan oleh Setianda dan Andadari ( 2015 )

Dalam penelitiannya Setianda dan Andari menjelaskan bahwa Sektor pariwisata adalah suatu sektor yang dapat memberikan suatu kontribusi untuk meningkatkan

perekonomian pada suatu negara. Setianda juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan perekonomian suatu negara melalui pariwisata tentunya peningkatan daya saing pariwisata menjadi kunci agar sektor pariwisata di Indonesia mampu memperoleh kepercayaan yang tinggi baik bagi para wisatawan mancanegara ataupun para investor dari luar negeri.

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat meningkatkan daya saing pariwisatanya dan untuk mencapai manfaat dari peluang adanya MEA setidaknya di perlukan upaya pemasaran yang efektif misalnya dengan memahami kebutuhan, keinginan serta memahami karakter para pelaku wisatawan yang ingin berwisata ke Indonesia

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Setianda sekiranya ada dua pendekatan penting yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana daya saing pariwisata Indonesia dalam ASEAN yang pertama yaitu, Pendekatan *International Arrival Tourist*, pendekatan ini mengacu pada suatu analisis yang didasarkan pada pengukuran jumlah wisman mancanegara yang berkunjung ke masing- masing negara di ASEAN, dari data penelitian yang di lakukan oleh setianda berdasarkan data yang di ambil dari *ASEAN Tourism Statistics* menunjukkan bahwa kunjungan wisman yang berkunjung ke Indonesia masih tergolong cukup rendah di bandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Siingapura dan Thailand dimana Indonesia hanya mampu bertahan untuk menduduki posisi ke 4 dalam capaian jumlah wisatawan mancanegara.

Kemudian pendekatan kedua, yaitu : *Travel dan Tourism Competitiveness Report ( TTCI )*. Dalam pendekatan ini menjelaskan mengenai daya saing pariwisata di lihat dari peringkat posisi suatu negara yang di tentukan oleh *World Economic Forum* yang telah menjadi standart kelayakan untuk penilaian daya saing pariwisata suatu negara yang telah di akui secara global. Dalam hal ini setidaknya ada 14 pilar yang di jadikan suatu penilaian untuk menentukan posisi daya saing sektor pariwisata yaitu: 1). Kelestarian, 2 ) Kebijakan dan Regulasi, 3) Kesehatan dan Kebersiahan, 4) Keselamatan dan Keamanan, 5) Prioritas Sektor Pariwisata, 6) Infrastruktur Transportasi darat, 7) Infrastruktur Transportasi Udara, 8) Infrastruktur Teknologi komunikasi dan Informasi, 9) Infrastruktur Pariwisata, 10) Harga pariwisata, 11) Sumber daya Manusia, 12) Daya Tarik Pariwisata, 13) Sumber Daya Alam, 14)

Sumber Daya Budaya . Menurut penelitiannya Setiandi menjelaskan bahwa dari pendekatan kedua ini daya saing pariwisata Indonesia di kawasan ASEAN pada tahun 2015 juga masih berada di posisi ke 4 yaitu berada di bawah Siangpura, Malaysia dan Singapura. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi kelemahan pariwisata Indonesia yang menyebabkan daya saing pariwisata Indonesia berada jauh di bandingkan negara ASEAN lainnya yaitu : permasalahan Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Transporstasi.

Meskipun jumlah wisman dan posisi daya saing pariwisata Indonesia masih berada dibawah Thailand, Malaysia dan Singapura. Setidaknya menurut penelitian yang di lakukan oleh Sentiandi, sektor pariwisata Indonesia masih memiliki beberapa potensi yang besar untuk dapat terus di tingkatkan disisi lain pemerintah Indonesia juga masih perlu untuk menjaga beberapa wisatawan loyal yang cukup banyak mengunjungi Indonesia di beberapa tahun terakhir seperti Australia, Korea, China dan India.

- 2) Tulisan penelitian kedua di tuliskan oleh Wong dan Tang ( 2010 ) yang berjudul *“Tourism and openness to trade in Singapore: evidence using aggregate and country-level data”*

Penelitian ysng di tuliskan oleh Wong dan Tang mencoba mengkaji mengenai perkembangan sektor pariwisata di singapura dalam sebuah dinamika liberalisasi. Dalam penelitiannya Wong menjelsakan dalam bahwa sektor pariwisata telah memberikan suatu implikasi positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Singapura. Studi yang di lakukan oleh Wong dan Tang lebih dalam mengeksplorasi hubungan kausalitas antara pariwisata dan keterbukaan perdagangan dengan menggunakan variable hitungan seperti adanya jumlah kunjungan wisatawan dan data tentang komponen perdagangan ( barang dan jasa ) dari beberapa mitra dagang negara Singapura seperti, Malaysia, China, AS, Jepang dan Korea Selatan.

Wong selanjutnya menjelaskan bahwa Singapura merupakan salah satu negara yang paling terbuka di dunia, dan berkat adanya penerapan rezim perdagangan bebas dan kebijakan investasi asing yang terbuka, pada bulan juni 2008, Singapura dinilai telah mampu meraih peningkatan ekonomi yang cukup tinggi dengan meraih pendapatan PDB ( produk domestic bruto) sebesar 506 persen dari jumlah rasio

total perdagangan bebas yang telah dilakukan oleh Singapura. Adanya peningkatan perekonomian di Singapura tersebut kemudian memberikan pandangan positif atas adanya perdagangan bebas, dan Wong menjelaskan bahwa keterbukaan suatu negara untuk berdagang adalah menjadi penentu pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan.

Sementara dalam hal perkembangan perdagangan sector pariwisata di Singapura menurut Singapore Tourism Board, industri pariwisata di Singapura telah mampu menyumbang sekitar 3% dari PDB negara dan menjadi salah satu sektor jasa terbesar dalam perekonomian negaranya. Mengingat pariwisata merupakan industri jasa yang membutuhkan dukungan dari industri lain, maka perkembangan industri pariwisata dapat berkontribusi pada pesatnya pertumbuhan sektor lain di Singapura. Misalnya, pariwisata dapat meningkatkan permintaan domestik untuk konstruksi, transportasi, perdagangan grosir dan eceran, bahkan peralatan dan instrumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Selain penjelasan di atas, Wong juga mengungkapkan bahwa Singapura juga merupakan salah satu dari lima ekonomi paling terbuka teratas dalam hal pariwisata, dan keterbukaan sektor pariwisata Singapura akan menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa di Singapura karena besarnya jumlah pengunjung internasional dan industri pendukung yang dibutuhkan pariwisata berimplikasi positif pada pertumbuhan perekonomian di Singapura. Salah satu implikasi positif dalam keterbukaan sektor pariwisata di Singapura misalnya adalah adanya pertumbuhan lalu lintas udara, peningkatan volume perdagangan dunia, globalisasi operasi bisnis dan internasionalisasi keuangan dan bisnis jasa. Selain itu, peningkatan perjalanan internasional juga disebabkan oleh lokasi strategis Singapura bagi investor global dan wisatawan internasional, manufaktur yang kompetitif, dan infrastruktur yang sangat baik untuk menarik perusahaan multinasional.

Dalam penelitiannya Wong menjelaskan mengenai liberalisasi perdagangan ia menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan seharusnya dilihat sebagai katalis penting untuk pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata dalam suatu perekonomian. Seperti halnya Singapura, dimana dengan tingkat

keterbukaan perdagangannya yang tinggi dapat meningkatkan akses pasar ke sektor barang dan jasanya, termasuk pariwisata, yang bergantung pada industri pendukung yang beragam. Selain itu, terdapat dampak positif dari keterbukaan perdagangan pada aktivitas perdagangan lintas batas dan intra-perusahaan, yang cenderung memfasilitasi perjalanan internasional, dan karenanya mendorong pariwisata. Lebih jauh, liberalisasi perdagangan seperti penandatanganan FTA sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata di tanah air, yang tercermin dari meningkatnya persaingan yang bermuara pada penurunan harga domestik serta peningkatan kualitas dan ragam barang. Pekerjaan perintis yang memeriksa berbagai pengukuran daya saing tujuan wisata tersedia.

Karenanya, keterbukaan perdagangan secara konseptual memiliki kecenderungan untuk mempromosikan pariwisata misalnya di karenakan terbukanya lebih banyak perdagangan internasional tidak hanya dapat meningkatkan akses pasar ke sektor pariwisata itu sendiri dan mendorong perjalanan internasional (sebagai akibat dari peningkatan perdagangan internasional) tetapi juga dapat meningkatkan persaingan, sehingga pengunjung internasional dapat menikmati harga barang dan jasa yang lebih rendah dengan keragaman yang lebih besar dan variasi yang lebih luas. Kemungkinan juga ada kausalitas terbalik yang berjalan dari pariwisata ke keterbukaan dalam perdagangan. Misalnya, jika ada pertumbuhan yang signifikan dalam kedatangan pengunjung internasional di Singapura yang disebabkan, misalnya, biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi dalam produksi barang dan jasa ini dapat mengarah pada aktivitas perdagangan internasional lebih lanjut melalui dua efek. Efek langsung berkaitan dengan pelancong internasional yang mengkonsumsi barang dan jasa akhir (yang, dalam kasus khusus ini, juga dikenal sebagai konsumsi di luar negeri) dari berbagai sektor (seperti perbankan, keuangan, hotel dan restoran, telekomunikasi, perjalanan dan transportasi, retail, dll) dari negara tuan rumah. Persepsi ini cenderung mendorong perdagangan ekspor untuk negara. Sementara efek tidak langsung melibatkan sektor terkait pariwisata (yaitu, di negara tuan rumah), yang pada gilirannya membeli barang dan jasa setengah jadi dari luar negeri hal ini memberikan kesempatan bagi perdagangan impor yang lebih tinggi.

Jelas, pariwisata dapat mendorong negara tuan rumah untuk membuka diri terhadap lebih banyak perdagangan internasional.

Dari hasil studi penelitian yang diteliti oleh Wong dan Tang menjelaskan bahwa adanya keterbukaan pasar yang cukup luas di Singapura memberikan implikasi positif terhadap terdahap sektor perdagangan lainnya sebaliknya keterbukaan perdagangan barang juga akan memberikan dampak positif terdapat sektor pariwisata di Singapura. Secara umum, temuan menunjukkan kausalitas dua arah antara pariwisata dan keterbukaan terhadap perdagangan barang dagangan. Bukti yang menunjukkan penyebab dari keterbukaan perdagangan barang dagangan ke pariwisata menyiratkan bahwa liberalisasi perdagangan lebih lanjut di sektor barang (misalnya, masuknya FTA) dapat dilihat sebagai sarana penting untuk pertumbuhan sektor pariwisata. Misalnya, dengan FTA bilateral atau multilateral, Singapura dapat memiliki akses preferensial ke sektor tertentu dari mitranya, dan sebaliknya. Dengan demikian, FTA membantu mempromosikan perdagangan dua arah (atau keterlibatan multilateral), yang pada gilirannya dapat merangsang perjalanan bisnis internasional ditambah tujuan terkait lainnya.

3) Penelitian selanjutnya dituliskan Ahmed (1996) yang berjudul *“Economic liberalization in India: opportunities for multinational corporations in the hospitality and tourism sector”*

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed lebih banyak menjelaskan mengenai pengaruh MNC di sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di India, penelitian yang dilakukan Ahmed bersifat ekplanatif menjelaskan hubungan kebermanfaatann dari adanya pengaruh liberelisasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah India dan hubungannya dengan adanya pengaruh positif dari adanya investasi yang dilakukan oleh MNC sektor pariwisata di India.

Dalam Penelitiannya Ahmed menjelaskan bahwa pada tahun 1950 pasca perang dunia di Eropa, India awalnya dikenal oleh negara-negara Eropa saat itu sebagai negara yang damai sehingga banyak dari negara Eropa saat itu yang tertarik untuk berinvestasi di India, namun dikarenakan masih adanya sistem sosialis yang tinggi di India menyebabkan banyak perusahaan asing yang

kemudian mengalihkan investasi mereka untuk berinvestasi ke negara ASIA lainnya hal ini di karenakan tingginya penolakan oleh para pekerja india saat itu atas upah murah yang di berikan kepada para pekerja India yang di nilai kurang adil yang kemudian menyebabkan banyak perusahaan asal Eropa mencabut investasinya dan beralih ke negara lainnya, dan berkurangnya jumlah investor asing di India membuat India saat itu mengalami perekonomian yang kurang baik,namun di sisi lain pemerintah India melihat saat itu, India merupakan kawasan yang sering menjadi perlintasan perdagangan dunia hal ini mendorong pemerintah India melakukan reformasi sistem ekonomi dan ingin bergabung dalam sistem perdagangan global yang kemudian mendorong adanya sitem liberalisasi perdagangan di India saat itu.

Menurut penelitian Ahmed, Sistem liberalisasi perekonomian di India dapat di katakan baru mulai sejak pemerintahan India di pimpin oleh P. V. Narasimha Rao pada tahun 1991 mulai menjabat dan dukungan luas atas kebijakan-kebijakan liberalisasi di negara ini di anggap menjadi pertanda baik bagi keberlangsungan jangka panjang mereka meskipun ada pergantian pemerintahan setelah pemilihan umum Mei 1996. Untuk mengatasi situasi ekonomi yang memburuk, India telah mengadopsi serangkaian tindakan stabilisasi yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan investor dan. membalikkan arus keluar modal. Kebijakan tersebut termasuk reformasi struktural yang bertujuan untuk mengurangi intervensi pemerintah, mendorong investasi asing, privatisasi sektor publik, meningkatkan persaingan dalam negeri, dan mempercepat integrasi negara ke dalam ekonomi dunia.

Ahmed juga menjelaskan dalam penelitiannya mengenai hubungan liberalisasi ekonomi dengan pariwisata dalam hal ini ia mengaris bawahi bahwa keterbukaan sistem ekonomi merupakan media yang dapat meningkatkan sektor pariwisata suatu negara, sebaliknya dengan di bukanya sektor pariwisata secara luas maka akan mendorong serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup luas dan positif bagi suatu negara, sehingga dalam hal ini pemerintah India melihat adanya keterbukaan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara termasuk India. Belajar dari perkembangan pariwisata yang berkembang di beberapa negara ASIA seperti

China, Hongkong dan Indonesia dimana negara-negara tersebut di nilai telah mendapatkan manfaat sangat tinggi dari adanya perkembangan sektor pariwisata di kawasan ASIA sementara pariwisata India menurut penelitian yang di lakukan Ahmed masih jauh dari negara seperti Indonesia, Hongkong dan China. Sehingga dengan adanya potensi peningkatan ekonomi di kawasan ASIA lainnya yang di nilai cukup potensial karena perkembangan pariwisata kemudian mendorong pemerintah India juga melakukan liberalisasi di sektor pariwisatanya dengan cara menarik perhatian para investor asing untuk mau berinvestasi di negara India.

Sebagai hasil dari kebijakan investasi asing yang baru diliberalisasi, India menawarkan hingga 51% ekuitas kepada investor asing dalam proyek-proyek pariwisata baru. Proyek di destinasi pariwisata terbelakang yang baru ditunjuk diizinkan untuk melindungi hingga 20% dari keuntungan mereka dari pajak untuk jangka waktu sepuluh tahun. Properti perhotelan juga dapat memenuhi syarat untuk penghapusan depresiasi pada tahun pertama dari 50% pabrik dan mesin-mesin besar dan 100% peralatan dan barang-barang mesin yang harganya kurang dari 400 dollar. Menurut Ahmed hal ini wajar di lakukan oleh pemerintah India saat itu karena beberapa negara bagian juga menawarkan insentif tambahan seperti subsidi, pengurangan tarif pembiayaan, dan keringanan pajak negara bagian. Semua pendapatan devisa dibebaskan dari pajak jika mereka diinvestasikan kembali di sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian dalam negerinya.

Dan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan meningkatkan pendapatan devisa dari pariwisata internasional yang masuk, India menawarkan insentif yang menarik bagi perusahaan multinasional untuk investasi keuangan, teknologi, dan manajerial dalam infrastruktur di sektor hotel dan pariwisatanya dimana dalam hal ini investor asing di berikan akses untuk menjalankan usahanya di sektor pariwisata dengan berbagai kemudahan yang sekiranya dapat menguntungkan para investor karena bagi pemerintah India pembangunan pariwisata akan membawa modal dan teknologi yang sangat dibutuhkan ke India, menghasilkan infrastruktur yang lebih baik. Ini akan meningkatkan taraf hidup orang India yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan lebih lanjut dalam pariwisata internasional. Industri perhotelan dan pariwisata di India siap untuk berkembang pesat. Kebijakan liberalisasi ekonomi baru pemerintah,

dikombinasikan dengan ketersediaan insentif bagi investor internasional dan faktor sosial ekonomi yang menguntungkan yang diidentifikasi dalam makalah ini, menyajikan peluang emas bagi perusahaan multinasional di sektor perhotelan dan pariwisata dan hal inilah yang menjadi penyebab investor asing mau berinvestasi pada sektor pariwisata di negara India.

Selanjutnya Ahmed menjelaskan bahwasannya ada beberapa faktor dan indikator yang menjadi pendukung ketertarikan investasi Asing di sektor pariwisata di India dapat meningkat yaitu hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintahnya telah memberlakukan beberapa kebijakan seperti:

1. Faktor financial , Biaya tenaga kerja India yang rendah dan laba operasi kotor yang tinggi harus berfungsi sebagai faktor yang menguntungkan untuk memotivasi perusahaan multinasional untuk menembus pasar India. Misalnya, rata-rata hotel mewah New Delhi memiliki laba operasi kotor 40,4%, lebih dari dua kali lipat dari rata-rata hotel mewah AS.
2. Tersedianya tenaga terampil, dalam hal ini sejak tahun 1960 an pemerintah India telah memberikan beragam fasilitas untuk menunjang profesionalitas bagi untuk peningkatan SDM di sektor pariwisatanya misalnya dengan mendirikan berbagai sekolah profesional di bidang pariwisata serta beragam kursus yang difasilitasi oleh negaranya untuk membentuk tenaga profesional di sektor pariwisata dan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa India merupakan negara yang cukup lama untuk mempersiapkan tenaga kerjanya menjadi tenaga kerja yang terampil dan berkualitas
3. Kemudahan peningkatan lalu lintas bisnis, dalam hal ini sektor pariwisata India sangat diuntungkan oleh beragam MNC yang berkembang di India, dengan beragam brand perusahaan asing yang terkenal kemudian MNC setidaknya banyak membantu India dalam hal melakukan promosi dan pemasaran di sektor pariwisatanya
4. Ketersediaan kemudahan meraih modal di India
5. Adanya kemudahan untuk bermitra dan didorongnya kemudahan pengembangan untuk memiliki suatu usaha di sektor pariwisata misalnya dalam hal *franchises* ( hak milik )

6. Serta tersedianya legal hukum yang transparan dan dapat di pahami oleh para investor misalnya masih banyak di negara-negara lain yang tidak menyediakan aturan hukumnya kedalam multi bahasa sementara di India telah menerapkan sistem tersebut sehingga pihak asing dapat memahami secara mudah mengenai aturan hukum di India dalam berinvestasi.

Dari beberapa penelitian di atas penulis berkesimpulan bahwa adanya liberalisasi pariwisata ternyata memberikan potensi yang cukup baik bagi peningkatan perekonomian di suatu negara sebagaimana misalnya penelitian yang di lakukan oleh Wong yang menjelaskan bahwa Singapura merupakan salah satu negara yang sangat terbuka terhadap sektor perekonomiannya terutama di sektor pariwisatanya dan hal ini kemudian memberikan implikasi bagi pertumbuhan ekonomi di Singapura dan membawa dampak positif bagi hubungan perdagangan lainnya.

Sebaliknya penelitian yang di lakukan oleh Ahmed mengenai liberalisasi perekonomian di India dan hubungannya dengan keterbukaan pada sektor pariwisatanya ternyata dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yaang dapat memberikan manfaat bagi negara India kerena keterbukaan di sektor pariwisata mendorong banyaknya investasi asing pada sektor tersebut juga memberikan implikasi yang cukup luas bagi kemajuan warga India sehingga tak heran jika India dalam hal ini kemudian meberikan kemudahan bagi para investor asing untuk berinvestasi di sektor pariwisata di India.

Dari kedua penelitian di atas penulis melihat bahwa penelitian yang di lakukan oleh Wong ataupun Ahmed hanya semata hanya melihat sisi positif dari adanya liberalisasi pariwisata tanpa menjelaskan adanya pengaruh negatif dari sebuah sistem liberalisasi bahkan tidak menjelaskan misalnya tingkat daya saing pariwisata Singapura ataupun India di tingkatan global ataupun misalnya bagaimana indikator pariwisata di Singapura ataupun India jika di hubungkan dengan 14 pilar daya saing yang menunjang kesuksesan pengembangan pariwisata di negaranya sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Setianda, sebab menurut penulis dalam hal menjalankan sistem liberalisasi tentunya di perlukan berbagai

kesiapan yang cukup matang oleh suatu negara agar liberalisasi perdagangan baik barang dan jasa dapat memberikan dampak positif oleh suatu negara.

Selanjutnya, jika di lihat dari konten yang di tuliskan oleh para peneliti di atas, penulis belum menemukan kajian yang membahas mengenai bagaimana pemerintahan suatu negara memanfaatkan peluang liberalisasi pariwisata dalam suatu kawasan regional sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisatanya melalui adanya liberalisasi pariwisata. Maka dari itu penulis ingiin mengangkat suatu penelian baru terkait bagaimana peran pemerintah memanfaatkan peluang keterbukaan pasar pariwisata di ASEAN untuk meningkatkan daya saing pariwisatanya dalam era MEA

## **E. Kerangka Teori**

Untuk menjawab pertanyaan yaang telah di ajukan oleh penulis dalam rumusan masalah diatas. Maka penulis akan menggunakan teori yang sesuai dengan pembahasan diatas. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **E.1 Teori Liberalisasi Pariwisata**

Beberapa kalangan meyakini bahwa pariwisata merupakan sektor yang mampu berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh seperti terciptanya lapangan pekerjaan, pengurangan angka kemiskinan serta penguatan daya beli masyarakat menjadi mata rantai positif dari peningkatan nilai ekonomi di sektor usaha tanpa cerobong sehingga dalam hal ini pariwisata bagian penting bagi perekonomian pembangunan bangsa-bangsa (WIdiatedja, 2011).

Berkenaan dengan adanya perdagangan bebas internasional pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang terkena imbas dari liberaslisasi perdagngan. Wiliam (2002) menjelaskan Pariwisata adalah salah satu bidang aktivitas ekonomi tertua yang tercakup di bawah Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) WTO. Pariwisata dan layanan terkait perjalanan menyumbang sekitar 11% dari PDB Dunia dan mempekerjakan sekitar 200 juta orang di seluruh dunia. Mereka juga mewakili 34% dari ekspor jasa dunia (UNESCO Courier, 1997). Selain itu, mengingat terdapat sekitar 700 juta

pelancong internasional per tahun, sektor terkait pariwisata dan perjalanan telah menjadi sumber pendapatan yang dinamis dan sektor strategis utama untuk pembangunan di banyak negara, terutama di belahan dunia Selatan. Layanan terkait pariwisata dan perjalanan masih sangat didominasi oleh negara-negara Utara. Sumber utama tetap Eropa dan AS, dengan beberapa gelombang masuk baru dari Asia dan Amerika Latin. Hampir setengah dari turis dunia berasal dari enam negara di Eropa yang juga termasuk dalam sepuluh negara dengan pendapatan / pembelanjaan pariwisata terbesar dunia). AS adalah nomor satu dalam pengeluaran / pendapatan pariwisata dan tujuan terpopuler kedua. Asia Timur dan Pasifik diharapkan menjadi yang kedua dalam menghasilkan wisatawan pada tahun 2020. Di erapa dan Amerika liberalisasi dalam sektor pariwisata telah sukses dalam perkembangannya bahkan sektor ini menjadi sektor utama yang mampu menjadi pendapatan di negara maju.(Williams Mariama, 2002) kesuksesan negara-negara Eropa kemudian di ikuti oleh berbagai negara lainnya di kawasan selatan untuk mengembangkan pariwisatanya salah satu caranya dengan melakukan liberalisasi pada sektor pariwisatanya, semenantara **kecenderungan sentral liberalisasi dalam pariwisata adalah** mengurangi peran pemerintah negara berkembang dalam mengelola pariwisata, investasi, dan kebijakan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan (dan keterbatasan) pariwisata sebagai alat untuk pembangunan di negara-negara Selatan (Williams Mariama, 2002)

Dari ulasan diatas dapat kita pahami bahwasannya liberalisasi dalam pariwisata merupakan fakta yang tidak dapat di hindari, sementara di sisi lain berbagai pengamat juga menjelaskan bahwa adanya liberalisasi pariwisata sangat memberikan implikasi yang cukup baik bagi perkembangan perekonomian, sebagaimana Wong dan Tang (2010) menjelaskan mengenai hubungan perdagangan bebas dan pariwisata di Singapura, ia menjelaskan bahwasanya liberalisasi merupakan katalis penting untuk pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata dalam suatu perekonomian. Seperti halnya Singapura, dimana dengan tingkat keterbukaan perdagangannya yang tinggi dapat meningkatkan akses pasar ke sektor barang dan jasanya, termasuk

pariwisata, yang bergantung pada industri pendukung yang beragam. sementara Ahmed dalam tulisannya yang berjudul *Economic liberalization in India: opportunities for multinational corporations in the hospitality and tourism sector* menguraikan bahwa liberalisasi juga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi di India, dengan adanya hal tersebut kemudian pemerintah India mencoba memberlakukan liberalisasi di sektor pariwisatanya dengan memberikan peluang investasi kepada pihak asing dan swasta agar mau berinvestasi di India.

Kasus liberalisasi pariwisata di Singapura dan India memberikan gambaran bahwa liberalisasi telah masuk pada lini sektor pariwisata dunia sehingga bukan lagi menjadi fenomena yang tabu ketika setiap negara kemudian berlomba-lomba untuk melakukan suatu bentuk privatisasi dalam upaya meningkatkan daya saing pariwisatanya dan untuk memperoleh investasi dari adanya keterbukaan pasar pariwisata secara global.

Proses adanya liberalisasi dalam sektor pariwisata sebenarnya tidaklah lepas dari adanya sebuah pemahaman makna ataupun teori liberalisasi yang telah berkembang dan kemudian dianut oleh banyak negara dan dipercayai dapat meningkatkan perekonomian negaranya. berkaitan dengan ini Held mencoba mengilustrasikan makna dari liberalisasi ekonomi sebagai berikut :

**Liberalisasi ekonomi adalah** proses menghilangkan hambatan perdagangan domestik dan global. Misalnya, kendala ekonomi dapat berupa tarif perdagangan, program subsidi, pajak, keterlibatan pemerintah dalam industri swasta, dll. Logika yang mendasari kendala ekonomi ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari kekuatan pasar yang kompetitif. Salah satu makna liberalisasi ekonomi adalah reformasi ekonomi yang di lancarkan dengan cara adanya pelonggaran peraturan pemerintah yang mencegah perusahaan swasta memasuki pasar (Held & Steel, 1981).

Senada dengan itu, Kay, Mayer, dan Thompson (1986) berpendapat bahwa **liberalisasi ekonomi adalah** penghapusan regulasi untuk meningkatkan persaingan dalam industri di suatu negara. Singkatnya, liberalisasi memerlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan berbagai hambatan baik

internal dan external untuk menciptakan perdagangan yang kompetitif dalam industri dan pasar dan bahwa komponen ini harus dipandang sebagai elemen yang terpisah namun saling melengkapi dengan privatisasi dalam proses transisi suatu negara. Singkatnya liberalisasi dapat terwujud dengan mengurangi regulasi yang dapat menghambat dan batasan-batasan lainnya terhadap kegiatan ekonomi serta adanya kegiatan untuk melakukan privatisasi badan usaha milik pemerintah, penurunan pajak usaha, dan penghapusan batasan terhadap modal asing. (Kay et al., 1986)

Dari penjelasan makna di atas liberalisasi ekonomi menekankan adanya proses pengurangan peran pemerintah, serta adanya upaya privatisasi untuk mewujudkan peningkatan ekonomi bagi suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut, jika hal ini di hubungan dengan sektor pariwisata yang ada di Indonesia maka teori liberalisasi yang di utarakan di atas menjadi sebuah kebijakan yang di adopsi oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisatanya dengan memanfaatkan peluang adanya sistem liberalisasi baik secara internasional dan regional dimana kebijakan tersebut dapat kita temui pada regulasi yang telah di keluarkan oleh pemerintah yang mendukung adanya kemudahan-kemudahan bagi pihak asing untuk berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia hal ini di lakukan guna mendukung peningkatan pariwisata dan peningkatan ekonomi di Indonesia.

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang teori yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kemudahan investasi bagi pihak asing serta kemudahan berwisata bagi wisatawan mancanegara
2. Memperluas pembangunan Destinasi wisata
3. Merancang strategi pemasaran pariwisata

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara yakni :

pertama, melakukan studi kepustakaan ( library Reseach ) uuntuk mendapatkan referensi penelitian yang diolah melalui buku-buku, jurnal berkala, majalah serta laporan institusi terkait misalnya : Kementrian Pariwisata, Dinas Pariwisata terkait, serta sumber dari situs internet dan berbagai sumber yang relavan yang dapat di gunakan untuk mendukung pokok pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

Kedua: melalui proses wawancara. Dimana dalam proses wawancara ini dilakukan dengan bertemu dengan narasumber secara langsung jika memungkinkan ataupun dengan melalui surat elektronik (email ). Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan pihak terkait yakni pihak dari Kementrian Pariwisata dan juga para pelaku dan pengamat pariwisata.

## **H. Sistem atika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan dipaparkan terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu:

**BAB I.** : Membahas tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II.** : Membahas mengenai dinamika perkembangan sektor pariwisata Indonesia dan Daya saing Pariwisata Indonesia serta komitmen Indonesia menjalankan Liberalisasi pariwisata dalam konteks regional

**BAB III.** : Membahas Permasalahan Pariwisata Indonesia

Dalam bab ini penulis akan membahas secara terperinci mengenai permasalahan permasalahan yang di hadapai oleh sektor pariwisata

Indonesia baik dari permasalahan kondisi di dalam negeri dan permasalahan pariwisata Indonesia atas berbagai isu kawasan regional

BAB IV : Pada Bab ini Penulis akan membahas mengenai analisis peran pemerintah dalam meningkatkan pariwisatanya melalui peluang adanya MEA

BAB V : Kesimpulan. Bab ini berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.